



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
Jl. Loader No. 7 Bogor Telp/Fax. (0251) 8362669

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya KPU Kota Bogor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di satuan kerja KPU Kota Bogor Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bogor merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangkapencapaian visi dan misi KPU Kota Bogor. Selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2014 merupakan media pertanggungjawaban yang merupakan wujud dari keinginan KPU Kota Bogor untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014.

Namun demikian ada pepatah "tak ada gading yang tak retak" sehingga dalam penyajian laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah ini banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan Khususnya di Kota Bogor.

Bogor, Januari 2015
Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Sekretaris,

ENCEP MOH. ALI ALHAMIDI, SH., MH
NIP.19610404 198203 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014 maka KPU sebagai penganut Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Tahun 2014 merupakan Tahun pelaksanaan Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2014, KPU Kota Bogor telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Adapun realisasi dan target capaian yang diperoleh selama Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1: Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel					
Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Berhasil
Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	3 dokumen	3 dokumen	100%	Berhasil
Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%	Berhasil
Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu					
Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu	1 dokumen	1 dokumen	100%	Berhasil
Sasaran 3: Meningkatnya efektivitas pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilukada					
Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014	8 dokumen	8 dokumen	100%	Berhasil

Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Sasaran 4: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Logistik Pemilu					
Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014	5 paket	5 paket	100%	Berhasil
Sasaran 5: Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor					
Jumlah dokumen usulan RENJA dan RKA K/L TA 2015	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan (Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2015 dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen	1 dokumen	100%	Berhasil
Sasaran 6: Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, efektif dan efisien					
Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN KPU Tahun 2014)	2 laporan	2 laporan	100%	Berhasil
Sasaran 7: Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Kota Bogor					
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%	Berhasil
Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%	Berhasil
Sasaran 8: Terlindunginya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Tahun 2014					
Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	100%	96,85%	96,85%	Berhasil
Sasaran 9: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam Proses Penghitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 yang berbasis teknologi					
Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 10: Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian					
Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	1 laporan	100%	Berhasil
Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	2 orang	2 orang	100%	Berhasil
Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	33 orang	33 orang	100%	Berhasil

Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Sasaran 11: Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip					
Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	2 jenis	2 jenis	100%	Berhasil
Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor		2 jenis	2 jenis	100%	Berhasil
Sasaran 12: Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik					
Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	Dokumen Barang Milik Negara	100%	100%	100%	Berhasil
Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu		1 laporan	1 laporan	100%	Berhasil
Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK		1 laporan	1 laporan	100%	Berhasil
Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor		100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 13: Tersusunnya dokumentasi arsip Tahapan Pemilu di KPU Kota Bogor					
Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	Undang-undang/ Peraturan/ Keputusan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Berhasil
Sasaran 14: Terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam Rangka Pemilu Tahun 2014					
Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali	39 kali	195%	Sangat Berhasil
Sasaran 15: Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bogor					
Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	Layanan Operasional Perkantoran Rutin	90%	90%	100%	Berhasil
Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran		100%	100%	100%	Berhasil

Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Sasaran 16: Terwujudnya KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel					
Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait Sengketa Pemilu	80%	100%	125%	Sangat Berhasil
	Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu				
Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu	7 kategori	6 kategori	86%	Cukup Berhasil
Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	12 parpol	12 parpol	100%	Berhasil
Sasaran 17: Terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pemilu					
Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	Publikasi Informasi Pemilu	90%	92%	102%	Sangat Berhasil
Sasaran 18: Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Legislatif 2014					
Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	Laporan Kampanye Pemilu Legislatif 2014	1 laporan	1 laporan	100%	Berhasil
Sasaran 19: Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu terkait teknis penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014					
Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	80%	80%	100%	Berhasil
Sasaran 20: Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014					
Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	75%	75,85	101%	Sangat Berhasil
Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014		75%	79,12	105%	Sangat Berhasil

Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Sasaran 21: Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan					
Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%	Berhasil
Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%	Berhasil
Sasaran 22: Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014					
Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%	Berhasil
Sasaran 23: Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan					
Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%	Berhasil
Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%	Berhasil

Pencapaian indikator kinerja yang paling signifikan terhadap sasaran strategis dan melampaui target meliputi:

1. Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014 mencapai 195%
2. Persentase kasus gugatan hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU mencapai 125%
3. Dalam bidang Publikasi Informasi Pemilu, Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik mencapai 102%
4. Persentase tingkat ingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 mencapai 101% dan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mencapai 105%.

Pencapaian tersebut di atas masuk ke dalam kategori sangat berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja. Adapun pencapaian yang cukup berhasil dalam arti kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja, adalah pada indikator Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum yaitu mencapai 86 %. Sedangkan kegiatan lainnya masuk dalam kategori berhasil karena mencapai 100%.

Pada Tahun 2014, pencapaian yang paling membanggakan adalah KPU Kota Bogor meraih Penghargaan sebagai KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi, yaitu:

- a. Juara Tingkat Jawa Barat dalam 2 kategori yaitu Kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Kategori Pemilu Akses.
- b. Juara Tingkat Nasional dalam Kategori Transparansi Informasi Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat memberikan penghargaan kepada KPU di daerah yang dinilai berprestasi dalam menggelar Pemilihan Umum 2014. Pada tingkat KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bogor meraih juara untuk dua kategori yaitu kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Pemilu Akses. Ada 6 (enam) kategori dalam penghargaan Penyelenggaraan Pemilu Berprestasi di Provinsi Jawa Barat kali ini, yaitu Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu, Transparansi Informasi Pemilu, Daftar Pemilih Berkualitas, Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas, Iklan Layanan Masyarakat Kreatif dan Pemilu Akses.

Pada tingkat KPU Provinsi Jawa Barat ini, KPU Kabupaten/Kota lain hanya mendapat satu kategori dan hanya KPU Kota Bogor yang meraih dua kategori sekaligus, yaitu kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Pemilu Akses pada Pemilu 2014. Kabupaten/Kota lain yang mendapat penghargaan KPU Awards diantaranya, KPU Tasikmalaya masuk dalam kategori penghargaan Iklan Layanan Masyarakat Kreatif, KPU Kabupaten Sumedang kategori Daftar Pemilih Berkualitas, KPU Kabupaten Majalengka berhasil menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas dan KPU Kota Bandung meraih penghargaan Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu.

Pada tingkat KPU Pusat, KPU Kota Bogor mendapatkan penghargaan sebagai KPU Kab/Kota berprestasi tingkat Nasional kategori Transparansi Informasi Pemilu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 di Ecopark Ancol, dalam acara Koordinasi Nasional KPU, KPU/KIP Povinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan penghargaan KPU Awards.

Prestasi ini merupakan capaian yang paling membanggakan bagi KPU Kota Bogor dalam penyelenggaraan pemilu. Prestasi ini diperoleh melalui perjuangan dan kerja keras segenap sumber daya manusia di KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu.



Penerimaan Penghargaan dari KPU RI kepada KPU Kota Bogor sebagai KPU Kabupaten/Kota Berprestasi Kategori Transparansi dan Informasi Pemilu

(17 Desember 2014)



KPU Kota Bogor meraih 2 kategori penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Barat sebagai KPU Kabupaten/Kota Berprestasi, yaitu Kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Kategori Pemilu Akses.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KOTA BOGOR	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	12
E. SISTEMATIKA LAPORAN	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014	13
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014	15
C. PENETAPAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014	21
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	23
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	41
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	
1. Rencana KinerjaKPU Kota Bogor Tahun 2014	
2. PenetapanKinerjaKPU Kota BogorTahun2014	
3. Realisasi AnggaranKPU Kota Bogor Tahun2014	

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada di Kota Bogor diberikan amanah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada, berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugasnya, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor. Sekretariat KPU Kota Bogor merupakan instansi pemerintah yang secara hierarki berada di bawah Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia (KPU RI).

Sebagai instansi Pemerintah, Sekretariat KPU Kota Bogor berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretariat KPU Kota Bogor wajib melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, penyusunan LAKIP didasari oleh semangat untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* yang salah satu indikatornya adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut salah satunya ialah penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

LAKIP dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, serta akhirnya diserahkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilihan umum harus memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas sehingga pemilihan umum dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Penyusunan LAKIP KPU Kota Bogor Tahun 2014 ini merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, berintegritas, profesional, dan akuntabel.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bogor tahun 2014 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bogor atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KOTA BOGOR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai penyelenggara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagai penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di tingkat Kota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi :
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kota;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggara di tingkat Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kota berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK;
 - 9) Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota dan KPU Provinsi;

- 10) Menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan mengumumkannya;
 - 11) Mengumumkan calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota dan membuat berita acaranya;
 - 12) Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - 13) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota;
 - 14) Menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan ketentuan perundang-undangan;
 - 15) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;
 - 16) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 17) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU KPU Provinsi dan atau undang-undang.
- b. Tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kota;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggara di tingkat Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja Kota;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja kota;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota dan KPU Provinsi;
 - 9) Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - 10) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota;

- 11) Menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan ketentuan perundang-undangan;
 - 12) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;
 - 13) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 14) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU KPU Provinsi dan atau undang-undang.
- c. Tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS, dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota berdasarkan peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
 - 6) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota;
 - 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 9) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota yang telah memenuhi syarat;
 - 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;

- 11) Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu kota dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- 14) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota ke KPU melalui KPU Provinsi;
- 15) Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- 16) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota;
- 17) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan ketentuan perundang-undangan;
- 18) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;
- 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan atau KPU Provinsi;
- 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 21) Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota; dan
- 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau Undang-undang.

2. Kewajiban

Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kota Bogor memiliki kewajiban yaitu meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan.

3. Kesekretariatan

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Bogor, maka KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor. Sekretariat KPU Kota Bogor bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Jenderal KPU.

Adapun tugas-tugas, fungsi-fungsi, wewenang, kewajiban dan susunan organisasi sekretariat KPU Kota Bogor yaitu sebagai berikut:

a. Tugas-tugas Sekretariat KPU Kota Bogor :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bogor;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor;
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi-fungsi Sekretariat KPU Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, fungsi Sekretariat KPU Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Bogor;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Bogor;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Bogor;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bogor;

- e. Membantu perumusan, penyusunan, dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Bogor;
- f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Bogor;
- h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Bogor;
- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Bogor;
- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor.

c. Wewenang Sekretariat KPU Kota Bogor :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memberikan layanan administratif, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Bogor :

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- 3) Mengelola barang inventaris KPU Kota Bogor.

e. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Bogor

Sekretariat KPU Kota Bogor bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor terdiri dari Sekretaris yang dibantu oleh subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Program dan Data

Uraian tugas pada subbagian Program dan Data yaitu:

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c) Mengelola, menyusun data Pemilih;
- d) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga pemerintahan lain yang terkait;

- e) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintahan;
- f) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- h) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
- l) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretariat KPU;
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU;
- n) Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU;
- o) Menyusun dan merencanakan anggaran proses pergantian antar waktu anggota KPU;
- p) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Hukum

Uraian tugas pada subbagian Hukum yaitu :

- a) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c) Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e) Menyusun dan mengelola bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f) Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- g) Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Bogor;
- h) Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k) Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;

- m) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian Hukum Kota Bogor;
- n) Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ;
- p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;
- q) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum Kota Bogor;
- r) Melaksanakan inventarisasi peraturan Perundang-undangan;
- s) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas pada subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yaitu :

- a) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Bogor;
- b) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor;
- c) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d) Mengumpulkan dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Bogor;
- f) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h) Menyusun draf pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j) Menyusun draf tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l) Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m) Menginventarisasi semua permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- o) Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;

- p) Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q) Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
- r) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

a) Uraian tugas pada subbagian Keuangan yaitu :

- (1) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
- (2) Memberikan informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota;
- (3) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan Keuangan;
- (4) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ / LPAK);
- (5) Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- (6) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- (7) Menyusun dan membuat daftar gaji/ honor pegawai;
- (8) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- (9) Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK dan telah diselesaikan oleh KPPN;
- (10) Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (11) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- (12) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- (13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- (14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ;
- (15) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- (16) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ;
- (17) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- (18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b) Uraian tugas pada subbagian Umum yaitu :

- (1) mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;

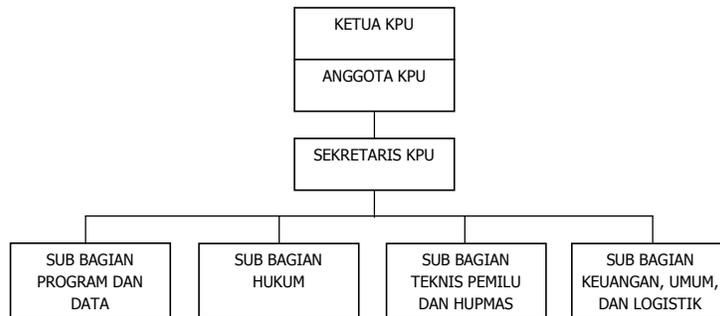
- (2) menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat dan ekspedisi;
- (3) menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- (4) menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- (5) menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- (6) mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- (7) menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- (8) menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- (9) menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- (10) menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- (11) mengumpulkan dan penyusunan arsip in- aktif;
- (12) mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- (13) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (14) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (15) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (16) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- (17) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c) Uraian tugas pada subbagian Logistik yaitu :

- (1) mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
- (2) menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- (3) mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- (4) mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- (5) menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- (6) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (7) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (8) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (9) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- (10) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi KPU Kota Bogor sebagai berikut:



Gambar 1.1 struktur organisasi KPU Kota Bogor

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan Kinerja, Kendala yang dihadapi, strategi pemecahan masalah

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, wewenang dan kewajiban; struktur organisasi dan sistematika laporan.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan Rencana Strategis 2010-2014, Rencana Kinerja Tahun 2014, Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pengukuran dan capaian kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran yang juga menguraikan program/kegiatan dan akuntabilitas keuangan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2010-2014, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi KPU adalah sebagai berikut:

Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang Profesional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Disamping itu relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah:

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;

2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai undang-undang;
4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya;
2. Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya;
3. Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang terselesaikan;
4. Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk masuk dalam data pemilih; dan
5. Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan hasil pemetaan masing-masing daerah.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

KPU Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2014. Rencana Kinerja Tahun 2014 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2010-2014 yaitu:

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel	Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3 dokumen
		Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	12 bulan layanan
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	1 dokumen
3	Meningkatnya efektivitas pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan	8 dokumen
4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Logistik Pemilu	Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu	5 paket
5	Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen usulan RENJA dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	2 laporan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	1 dokumen
8	Terlindunginya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Tahun 2014	Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam Proses Penghitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 yang berbasis teknologi	Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	100%
10	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan
		Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang
		Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	33 orang
11	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	2 jenis
		Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor	2 jenis
12	Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik	Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	100%
		Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu	1 laporan
		Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK	1 laporan
		Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor	100%
13	Tersusunnya dokumentasi arsip Tahapan Pemilu di KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	1 dokumen
14	Terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam Rangka Pemilu Tahun 2014	Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali
15	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bogor	Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%
		Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%
16	Terwujudnya KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	80%
		Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	7 kategori
		Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol
17	Terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pemilu	Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	90%
18	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	1 laporan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
19	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu terkait teknis penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014	Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	80%
20	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	75%
		Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	75%
21	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	1 laporan
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen
22	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	1 laporan
23	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan
		Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen

C. PENETAPAN KINERJA 2014

Pada Bulan Februari 2014, KPU Kota Bogor membuat Penetapan Kinerja (TAPKIN) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2014 sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel	Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	46.975.000
		Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3 dokumen	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	106.044.000
		Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	12 bulan layanan	Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan	947.541.000
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	1 dokumen	Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu	890.000
3	Meningkatnya efektivitas pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan	8 dokumen	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014	123.061.000
4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Logistik Pemilu	Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu	5 paket	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014	5.420.462.000

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Pagu
5	Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen usulan RENJA dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan (Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2015 dan RKA K/L TA 2015	21.094.000
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	2 laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN KPU Tahun 2014)	3.650.000
7	Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	1 dokumen	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	138.815.000
		Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	1 dokumen	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	43.478.000
8	Terlindunginya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Tahun 2014	Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	257.640.000
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam Proses Penghitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 yang berbasis teknologi	Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	100%	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	75.050.000
10	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	900.000
		Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	1.800.000
		Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	33 orang	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	117.284.000
11	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	2 jenis	Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	10.260.000
		Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor	2 jenis		

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Pagu
12	Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik	Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	100%	Dokumen Barang Milik Negara	27.431.000
		Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu	1 laporan		
		Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK	1 laporan		
		Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor	100%		
13	Tersusunnya dokumentasi arsip Tahapan Pemilu di KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	1 dokumen	Undang-undang/ Peraturan/ Keputusan	54.150.000
14	Terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam Rangka Pemilu Tahun 2014	Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali	Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	83.600.000
15	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bogor	Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%	Layanan Operasional Perkantoran Rutin	412.305.000
		Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%		
16	Terwujudnya KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	80%	Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait Sengketa Pemilu	3.493.000
		Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	7 kategori	Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu	100.498.000
		Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol	Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu	2.000.000
				Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	44.568.000
17	Terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pemilu	Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	90%	Publikasi Informasi Pemilu	3.650.000
18	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	1 laporan	Laporan Kampanye Pemilu Legislatif d 2014	36.310.000

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Pagu
19	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu terkait teknis penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014	Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	80%	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	22.481.673.000
20	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	75%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	996.145.000
		Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	75%		
21	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	1 laporan	Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	28.248.000
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	186.598.000
22	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	1 laporan	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	43.550.000
23	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	30.384.000
		Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	170.068.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2014, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2010-2014. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2014 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Bogor secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Skala kategori penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Rentang Nilai (dalam persen)	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Sedangkan perbandingan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3 dokumen	3 dokumen	100%
3	Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
4	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan	8 dokumen	8 dokumen	100%
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu	5 paket	5 paket	100%
7	Jumlah dokumen usulan RENJA dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen	1 dokumen	100%
8	Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	2 laporan	2 laporan	100%
9	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100%
10	Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
11	Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	96,85%	96,85%
12	Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	100%	100%	100%
13	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	1 laporan	100%
14	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang	2 orang	100%
15	Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	33 orang	33 orang	100%
16	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	2 jenis	2 jenis	100%
17	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor	2 jenis	1 jenis	50%
18	Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	100%	100%	100%
19	Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%
20	Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK	1 laporan	1 laporan	100%
21	Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor	100%	100%	100%
22	Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	100%
23	Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali	39 kali	195%
24	Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%	90%	100%
25	Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%	100%	100%
26	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	80%	100%	125%
27	Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	7 kategori	6 kategori	86%
28	Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol	12 parpol	100%
29	Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	90%	92%	102%
30	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	2 laporan	2 laporan	100%
31	Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	80%	80%	100%
32	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	75%	75,85	101%
33	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	75%	79,12	105%
34	Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%
35	Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	1 dokumen	100%
36	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	1 laporan	1 laporan	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
37	Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%
38	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	1 dokumen	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Bogor secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2014. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bogor pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	<i>Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel</i>
------------------	---

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	100
Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3 dokumen	3 dokumen	100
Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100

Capaian indikator kinerja di atas dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014
3. Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan

Pencapaian sasaran pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor di ukur dari outcome sasaran tersebut yaitu berupa ketepatan dari segi waktu dan kualitas pelaporan keuangan yang disajikan tiap bulannya dan juga ketepatan dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran seperti pembayaran gaji pegawai, honor dan tunjangan pegawai lainnya.

Sekretariat KPU Kota Bogor mengadministrasikan seluruh proses-proses keuangan baik transaksi rutin atau pun transaksi untuk keperluan pemilu didasarkan ketentuan keuangan yang berlaku, sehingga kualitas pelaporan keuangan Sekretariat KPU Kota Bogor dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang dibuat oleh KPU Kota Bogor meliputi:

1. Laporan Keuangan (SAI/SAKPA);
2. Laporan Rekonsiliasi;

3. Laporan Pajak;
4. Laporan Bendahara (BKU dan Pembantunya);
5. Laporan Realisasi;
6. Laporan Pengawasan Anggaran;
7. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara berupa bukti-bukti pengeluaran belanja.

Sasaran 2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu
------------------	---

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja (1)	Kinerja		
	Target (2)	Realisasi (3)	% Capaian (4)
Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, beberapa langkah yaitu :

1. KPU Kota Bogor telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk menyusun kebutuhan logistik pemilu 2014.
2. Menyusun rencana kebutuhan logistik dengan menentukan harga satuan aset logistik secara wajar

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 1 (satu) rencana kebutuhan logistik yang berisi harga satuan aset logistik yang wajar untuk keperluan pemilu 2014.

Sasaran 3	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu
------------------	---

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja (1)	Kinerja		
	Target (2)	Realisasi (3)	% Capaian (4)
Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan dan tepat waktu	8 dokumen	8 dokumen	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014 melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu
2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik pemilu
3. Melakukan pengelolaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilu untuk memetakan kebutuhan dan distribusi logistik untuk pemilu 2014

4. Melakukan fasilitasi pengadaan logistik pemilu melalui :
 - a. koordinasi pengadaan logistik pemilu dan melaporkan hasilnya melalui aplikasi SILOG dan media komunikasi lainnya
 - b. pengawasan proses produksi penyedia barang/jasa yang pengadaan dan pembiayaannya masuk ke dalam DIPA KPU Kota Bogor
5. Melakukan fasilitasi distribusi logistik pemilu dengan melakukan monitoring pengiriman logistik pemilu dari KPU Kota Bogor ke PPK, PPS dan TPS
6. Untuk mendapatkan pedoman tindak lanjut logistik pemilu pasca pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kota Bogor mengikuti bimbingan teknis pengelolaan aset logistik pemilu ke KPU Provinsi
7. Melakukan penghapusan logistik eks pemilu
8. Melakukan *stock opname* logistik pemilu

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 8 (delapan) dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi pengelolaan logistik
- b. Dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik pemilu
- c. Dokumen pengelolaan Sistem Informasi Logistik (SILOG)
- d. Dokumen fasilitasi pengadaan logistik
- e. Dokumen fasilitasi distribusi logistik pemilu
- f. Dokumen hasil kegiatan perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis pengelolaan aset logistik pemilu ke KPU Provinsi
- g. Dokumen penghapusan logistik eks pemilu
- h. Dokumen *stock opname* logistik pemilu

Sasaran 4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Logistik Pemilu
------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu yang dapat diimplementasikan tepat waktu	5 paket	5 paket	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 melalui pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Tahun 2014. Pengadaan logistik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan ATK untuk kelengkapan TPS pada Pemilu Legislatif, antara lain: spidol besar, spidol kecil, ballpoint, lem perekat, tali pengikat pemberi tanda pilihan, kantong plastik besar dan kecil, karet/tali pengikat.
2. Paket Pengadaan material untuk kelengkapan TPS pada Pemilu Legislatif, antara lain: mur

- dan baut kotak suara, gembok dan anak kunci, bantalan/alat coblos, paku/alat coblos.
3. Paket Pengadaan cetakan untuk kelengkapan TPS pada Pemilu Legislatif, antara lain: tanda pengenal KPPS, tanda pengenal saksi, tanda pengenal keamanan TPS, Sticker kotak suara.
 4. Paket Pengadaan ATK dan Cetakan untuk kelengkapan TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, antara lain: spidol besar, spidol kecil, ballpoint, lem perekat, tali pengikat pemberi tanda pilihan, kantong plastik besar dan kecil, karet/tali pengikat, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal saksi, tanda pengenal keamanan TPS, Sticker kotak suara.
 5. Paket Pengadaan material untuk kelengkapan TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, antara lain: gembok dan anak kunci, bantalan/alat coblos, paku/alat coblos.

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 5 (lima) paket pengadaan sebagaimana uraian di atas.

Sasaran 5	Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor
------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Dokumen usulan RENJA TA 2015 dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen	1 dokumen	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan melalui kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2015 dan RKA K/L TA 2015 yang memuat kebutuhan anggaran yang terdiri dari belanja mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran) dan belanja tidak mengikat untuk tahun anggaran 2015 serta anggaran yang berasal dari Hibah APBD. Untuk melaksanakan kegiatan ini, KPU Kota Bogor mengikuti rapat koordinasi penyusunan RENJA dan RKA K/L di KPU Provinsi dalam rangka penyusunan usulan kegiatan dan rencana kerja anggaran tahun 2015. Usulan ini kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU RI.

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 1 (satu) dokumen RENJA dan RKA K/L TA 2015.

Sasaran 6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, efektif dan efisien
------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	2 laporan	2 laporan	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN KPU Tahun 2014) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Penyusunan LAKIP dan TAPKIN
2. Menyusun Indikator Kinerja
3. Menyusun proses pelaksanaan kegiatan penyusunan LAKIP
4. Menyusun LAKIP dan TAPKIN serta menyampaikannya kepada KPU Provinsi pada bulan Februari 2014

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 2 (dua) laporan, meliputi LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN Tahun 2014.

Sasaran 7	Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Kota Bogor
------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	1 dokumen	1 dokumen	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014
2. Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014

Kegiatan Dokumen bidang penganggaran pemilu dilaksanakan dengan cara melakukan penyusunan program dan anggaran. Penyusunan program dan anggaran dilakukan melalui sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu. Langkah-langkah koordinasi yang dilakukan antara lain:

- a. Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran
- b. Menelaah kembali DIPA dan RKA K/L yang telah diterbitkan, mencakup program, kegiatan, output, komponen, sub komponen serta jenis belanja kegiatan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden Tahun 2014
- c. Mengidentifikasi permasalahan
- d. Melakukan revisi DIPA sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi RKA K/L Tahun 2014
- f. Melakukan rekrutmen tenaga *outsourcing*

Sedangkan kegiatan penyusunan Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014 dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahapan Pemilu 2014 TA 2014.

- b. Melakukan penyusunan Laporan Tahapan Pemilu

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini sebagai berikut:

- a. Pada indikator Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu, realisasi targetnya berhasil dicapai yaitu berupa 1 (satu) dokumen perencanaan dan penganggaran meliputi dokumen revisi DIPA yang termuat dalam dokumen Laporan Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran;
- b. Pada indikator Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Pemilu yang informatif, realisasi targetnya berhasil dicapai yaitu berupa 1 (satu) dokumen Buku Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2014, meliputi buku laporan tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Tahapan Pemilu Presiden Tahun 2014.

Sasaran 8	<i>Terlindunginya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Tahun 2014</i>
------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja (1)	Kinerja		
	Target (2)	Realisasi (3)	% Capaian (4)
Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	96,85%	96,85

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Updating dan kompilasi Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
2. Sosialisasi dan Implementasi PKPU Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan lainnya
3. Rapat Koordinasi dengan PPK dan PPS dalam rangka pemutakhiran data pemilih
4. Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI
5. Menghadiri Bimtek dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI
6. Melakukan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan menggunakan aplikasi SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), baik pada proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran ini adalah 96,85% untuk Pemilu Tahun 2014. Angka tersebut merupakan persentase rata-rata dari persentase data pemilih yang akurat pada Pemilu Legislatif sebesar 96,83% dengan Pemilu Peresiden dan Wakil Presiden sebesar 96,86%. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 666.124 orang, sedangkan jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) atau pemilih yang menggunakan KTP/Paspor saat pemungutan suara sebanyak 21.101 orang. Pemilih dalam

DPKtb tersebut menggunakan KTP/Paspor saat pemungutan suara karena tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa persentase akurasi data pemilih dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah sebesar 96,83%.

2. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 680.176 orang, sedangkan jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb) atau pemilih yang menggunakan KTP/Paspor saat pemungutan suara sebanyak 21.352 orang. Pemilih dalam DPKtb tersebut menggunakan KTP/Paspor saat pemungutan suara karena tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa persentase akurasi data pemilih dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebesar 96,83%

Dengan demikian, Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebesar 96,85%.

Sasaran 9	<i>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam Proses Penghitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 yang berbasis teknologi</i>
------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	100%	100%	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyediakan infrastruktur jaringan, fasilitas internet dan data center
2. Mengikuti bimbingan teknis aplikasi Sistem Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2014 (Situng)
3. Melakukan input/entry data C1 ke dalam aplikasi Situng dan memindai (scan) data C1 tersebut sebagai data gambar yang menjadi database pendukungnya. Entry data dan scan tersebut dilakukan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Mengirimkan hasil entry dan scan C1 ke KPU RI secara elektronik.

Realisasi target kinerja pada indikator Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu 100 %, artinya seluruh formulir C1, baik pada Pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, berhasil diinput ke dalam Aplikasi Situng sesuai dengan arahan dari KPU RI.

Sasaran 10	<i>Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	1 laporan	100%
Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang	2 orang	100%
Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	33 orang	33 orang	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yaitu pada Tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelantikan 1 (satu) orang pejabat struktural yaitu Kasubag Hukum
 - b. Kenaikan Pangkat bagi 2 (dua) orang PNS Organik TMT April 2014
 - c. Kenaikan gaji berkala PNS Organik sebanyak 7 (tujuh) orang.
2. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM, yaitu:

Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan diklat teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM yang diikuti oleh 2 (dua) orang pegawai, yaitu (satu) orang Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik serta 1 (satu) orang staff keuangan
3. Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014, yaitu:

Bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis s.d Sabtu / 20 s.d 22 Maret 2014

Tempat : Pajajaran Suite Resort and Convention Hotel
Jl. Bogor Inner Ring Road No. 17 Bogor Nirwana Residence (BNR) Bogor

Peserta : 33 (tiga puluh tiga) orang, terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner KPU Kota Bogor dan 28 (dua puluh delapan) orang dari Sekretariat KPU Kota Bogor.

Narasumber : 5 (lima) orang, yaitu:
 - a. Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat (Endun Abdul Hq, M. Pd)
 - b. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat (Heri Suherman, SH)
 - c. Anggota Tim Pemeriksa Daerah Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Barat (Drs. Affan Sulaeman, M. A)
 - d. Anggota Panwaslu Kota Bogor (Sasongko S. Putro, M.Si.)
 - e. Wakapolres Bogor Kota (M. Santoso, S.IK)

Pada sasaran ini, terdapat penambahan kegiatan yaitu berupa kegiatan Piagam Penghargaan bagi Penyelenggara Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pemberian Penghargaan/Award bagi Penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat memberikan penghargaan kepada KPU di daerah yang dinilai berprestasi dalam menggelar Pemilihan Umum 2014.

Pada tingkat KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bogor meraih juara untuk dua kategori yaitu kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Pemilu Akses. Ada 6 (enam) kategori dalam penghargaan Penyelenggaraan Pemilu Berprestasi di Provinsi Jawa Barat kali ini, yaitu Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu, Transparansi Informasi Pemilu, Daftar Pemilih Berkualitas, Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas, Iklan Layanan Masyarakat Kreatif dan Pemilu Akses.

Dalam Lomba tingkat KPU Provinsi Jawa Barat ini, KPU Kabupaten/Kota lain hanya mendapat satu kategori dan hanya KPU Kota Bogor yang meraih dua kategori sekaligus, yaitu kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Pemilu Akses pada Pemilu 2014. Kabupaten/Kota lain yang mendapat penghargaan KPU Awards diantaranya, KPU Tasikmalaya masuk dalam kategori penghargaan Iklan Layanan Masyarakat Kreatif, KPU Kabupaten Sumedang kategori Daftar Pemilih Berkualitas, KPU Kabupaten Majalengka berhasil menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas dan KPU Kota Bandung meraih penghargaan Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu.

Pada tingkat KPU pusat, KPU Kota Bogor mendapatkan penghargaan sebagai KPU Kab/Kota berprestasi tingkat Nasional kategori Transparansi Informasi Pemilu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 di Ecopark Ancol, dalam acara Koordinasi Nasional KPU, KPU/KIP Povinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan penghargaan KPU Awards.

Prestasi ini merupakan capaian yang membanggakan bagi KPU Kota Bogor dalam penyelenggaraan pemilu. Prestasi ini diperoleh melalui perjuangan dan kerja keras segenap sumber daya manusia di KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu.

Sasaran 11	<i>Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	2 jenis	2 jenis	100%
Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor	2 jenis	2 jenis	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran, berupa pembinaan dan pengelolaan tata usaha kearsipan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penataan arsip Pemilu dan pemilukada
2. Melakukan penyelamatan arsip pemilu/pemilukada permanen kepada Lembaga Arsip Kota Bogor

Dengan demikian, realisasi pencapaian target kinerja pada indikator di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib, realisasi targetnya berhasil dicapai yaitu 2 (dua) jenis berupa arsip pemilu dan pemilukada
2. Pada indikator Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor, realisasi targetnya berhasil dicapai yaitu 2 jenis berupa:
 - a. Surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013
 - b. Formulir-formulir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 baik di tingkat TPS (Formulir model C), PPS (Formulir model D) maupun PPK (DA).

Sasaran 12	Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja (1)	Kinerja		
	Target (2)	Realisasi (3)	% Capaian (4)
Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	100%	100%	100%
Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%
Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK	1 laporan	1 laporan	100%
Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor	100%	100%	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Dokumen Barang Milik Negara, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengelolaan BMN, antara lain: pengelolaan BMN melalui SIMAK BMN, penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Kota Bogor sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi dan stock opname persediaan untuk setiap periode pelaporan, menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN), melakukan konsolidasi ADK dengan KPU/KIP Provinsi sebagai UAPPB-W, dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB.
2. Penghapusan BMN yang rusak berat
3. Tuntutan Ganti Rugi, yaitu berupa 1 unit kendaraan dinas roda 4.

Berdasarkan laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil *stock opname*, jumlah kotak suara sebanyak 11.649 unit, yang terdiri dari kotak suara kondisi baik sebanyak 10799 unit dan kotak suara rusak sebanyak 850 unit. Sedangkan jumlah bilik suara sebanyak 2.062 unit, yang terdiri dari bilik suara kondisi baik sebanyak 2.651 unit, kotak suara rusak sebanyak 403 unit dan hilang sebanyak 8 unit. Adapun Jumlah Barang Milik Negara yang dilakukan TGR adalah mobil dinas yang hilang sebanyak 1 unit.

Sasaran 13	Tersusunnya dokumentasi arsip Tahapan Pemilu di KPU Kota Bogor
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan pendokumentasian arsip Undang-undang/peraturan/keputusan terkait pemilu. dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Penyusunan Dokumentasi Arsip Tahapan Pemilu
2. Melakukan pengumpulan produk hukum terkait tahapan pemilu
3. Melakukan klasifikasi produk hukum terkait tahapan pemilu berdasarkan tingkatannya, antara lain: Undang-undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat dan Keputusan KPU Kota Bogor.

Dengan demikian, realisasi pencapaian target kinerja pada indikator di atas adalah 100 % yaitu 1 dokumen.

Sasaran 14	<i>Terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam Rangka Pemilu Tahun 2014</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali	39 kali	195 %

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat dengan Instansi terkait terutama Kepolisian tentang Perencanaan dan pelaksanaan tugas Pengamanan kegiatan Tahapan Pemilu dan menjembatani keperluan dalam hal berkoordinasi dibidang Pengamanan dalam Pengamanan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan asset gedung kantor Komisi Pemilihan Umum.
2. Melakukan rapat dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, yaitu:
 - a. Disdukcapil, terutama terkait NIK dalam Daftar Pemilih;
 - b. Kesbangpol, terutama terkait kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, kampanye dan kegiatan tahapan;
 - c. DLLAJ, terutama terkait pelaksanaan kampanye rapat umum, sosialisasi yang melibatkan massa dan jalur jalan umum seperti gerak jalan sehat dan pawai keliling dan kegiatan lainnya;

- d. Sat Pol PP, terutama terkait kampanye, sosialisasi, penertiban alat peraga kampanye;
- e. LAPAS Paedang, terkait pemilih warga binaan LAPAS dan TPS di dalam LAPAS;
- f. Kecamatan dan kelurahan, terkait semua tahapan pemilu.

Jumlah kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor adalah sebanyak 39 kali, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi tentang Zona Kampanye Pileg sebanyak 3 kali;
2. Koordinasi tentang Lapangan Kampanye Pileg sebanyak 7 kali;
3. Koordinasi Pengamanan Logistik Pileg sebanyak 1 kali;
4. Koordinasi dalam rangka Kunjungan Kapolda Jabar terkait pengamanan pemilu sebanyak 1 kali;
5. Deklarasi Kampanye Damai Pileg sebanyak 1 kali;
6. Pawai kampanye damai Pileg sebanyak 1 kali;
7. Rapat koordinasi persiapan gerak jalan sehat sebanyak 2 Kali;
8. Gerak jalan sehat sebanyak 2 kali;
9. Pengamanan saat pelipatan surat suara pileg sebanyak 1 kali;
10. Pengamanan pemberangkatan surat suara Pileg ke PPK sebanyak 1 kali;
11. Rakor penghapusan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1 kali;
12. Pelaksanaan penghapusan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1 kali;
13. Pengamanan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2014 sebanyak 1 kali
14. Pengamanan pemberangkatan kotak suara dari KPU Kota Bogor ke KPU Provinsi pada Pileg sebanyak 1 kali;
15. Pengamanan Rapat Pleno terbuka penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 sebanyak 1 kali;
16. Pengamanan saat pelipatan surat suara Pilpres sebanyak 1 kali;
17. Fasilitasi Kampanye Pilpres sebanyak 4 kali;
18. Pengamanan logistik Pilpres sebanyak 1 kali;
19. Pengamanan pemberangkatan surat suara Pileg ke PPK sebanyak 1 kali;
20. Pengamanan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres sebanyak 1 kali;
21. Pemberangkatan kotak suara dari KPU Kota Bogor ke KPU Provinsi pada Pilpres sebanyak 1 kali;
22. Pengamanan saat pelipatan surat suara pilpres sebanyak 1 kali;
23. Koordinasi dengan Disdukcapil terkait NIK dalam daftar pemilih sebanyak 2 kali;
24. Koordinasi dengan LAPAS terkait pemilih warga binaan LAPAS sebanyak 2 kali.

Sasaran 15	<i>Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bogor</i>
-------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%	90%	100%
Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%	100%	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Layanan Operasional Perkantoran Rutin dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. kebutuhan sehari-hari perkantoran seperti: honor satpam/sopir, honor petugas kebersihan/pramubakti, ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan koran dan air minum pegawai;
2. Langganan daya dan Jasa seperti: belanja pengiriman surat dinas, langganan listrik, telepon dan air;
3. Pemeliharaan kantor, seperti biaya pemeliharaan gedung dan pemeliharaan peralatan dan mesin (servis kendaraan roda 4, AC, PC, printer dan barang inventaris lainnya)
4. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor seperti: honor operasional satuan kerja, pakaian dinas, perjalanan dinas ke KPPN dan Kanwil dan honor pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan.

Sasaran 16	Terwujudnya KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	80%	100%	125%
Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	7 kategori	6 kategori	86%
Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol	12 parpol	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait Sengketa Pemilu
2. Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu
3. Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu

4. Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU terealisasi sebanyak 100 %, yaitu 2 kasus gugatan, yaitu PDIP untuk DPRD Kota Bogor dan PAN untuk DPR RI. Dengan demikian, persentase capaian pada indikator kinerja ini adalah 125 %.
2. Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum yang terealisasi adalah sebanyak 6 kategori, yaitu Formulir C, Formulir D, Formulir DA, Formulir DB, Formulir EB dan SK Penetapan Calon Terpilih. Dengan demikian, persentase capaian pada indikator ini adalah 86 %.
3. Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu adalah 12 parpol. Dengan demikian persentase capaian pada indikator ini adalah 100 %.

Sasaran 17	Terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pemilu
-------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	90%	92%	102%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Publikasi Informasi Pemilu melalui pengembangan PPID dan pusat informasi pemilu yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan, pengumpulan dan updating data pemilu
2. Melakukan pelayanan data dan informasi bagi masyarakat yang meminta informasi dan data.

Adapun langkah-langkah atau prosedur permintaan informasi sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat,email,telepon);
2. Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek / jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan;
3. Petugas Informasi Komisi Pemilihan Umum mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2;
4. Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan;
5. PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja (permohonan informasi umum).

Sepanjang tahun 2014, terdapat 47 permintaan, terdiri dari permintaan informasi yang

dilakukan secara langsung mendatangi kantor KPU Kota Bogor oleh peminta informasi sebanyak 36 permintaan, permintaan informasi dengan cara mengirimkan surat permohonan informasi sebanyak 11 permintaan. Sesuai dengan prosedur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peminta informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek / jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. Peminta informasi yang datang langsung ke kantor KPU Kota Bogor mengisi formulir permintaan informasi.

Sedangkan untuk informasi yang diminta melalui internet (email dan media sosial) kurang lebih sebanyak 4 permintaan. Namun permintaan melalui internet tidak dapat terpenuhi secara optimal karena adanya keterbatasan dalam transfer data elektronik dan ada beberapa peminta informasi yang identitasnya (nama dan alamat) kurang jelas maupun ada yang tidak mencantumkan identitas asli.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik adalah 92%. Oleh karena itu persentase capaian indikator ini adalah 102%.

Sasaran 18	<i>Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Legislatif 2014</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	1 laporan	1 laporan	100%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Laporan Kampanye Pemilu 2014 yang isinya terdiri dari kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014. Dengan demikian, realisasi capaian indikator kinerja telah terpenuhi 1 laporan atau 100%.

Sasaran 19	<i>Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu terkait teknis penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	80%	80%	100%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU di Kota Bogor berupa Bimbingan Teknis Pemungutan dan

Penghitungan Suara yaitu sebagai berikut:

1. KPU Kota Bogor melakukan bimtek kepada Ketua dan Anggota PPK sebanyak 30 orang, yaitu:
 - a. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014
Waktu dan tempat Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dilaksanakan pada:
Hari / Tanggal : Senin / 24 Maret 2014
Pukul : 08.00 s.d 16.30 WIB
Tempat : Aula KPU Kota Bogor
 - b. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
Waktu dan tempat Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan pada:
Hari / Tanggal : Minggu / 22 Juni 2014
Pukul : 08.00 s.d 13.00 WIB
Tempat : Saung Hejo Jl. Raya Pakuan No. 15 Bogor
 - c. PPK melakukan bimtek kepada Ketua dan Anggota PPS
 - d. PPS melakukan bimtek kepada Anggota KPPS.

Sasaran 20	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	75%	75,85%	101%
Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	75%	79,12%	105%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014 melalui sub kegiatan berikut:

1. Penyebaran informasi pemilu melalui media massa dan elektronik
2. Pengadaan bahan penyebaran informasi pemilu
3. Fasilitasi media dan media center
4. Publikasi dan pewartaan informasi tahapan pemilu
5. Pengumpulan dan pengolahan ulasan pers
6. Pendidikan pemilih pemilu melalui kegiatan:
 - a. Konsolidasi nasional

- b. Kirab/karnaval
- c. Relawan demokrasi
- d. Pemantau pemilu
- e. Gerak jalan sehat

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 terealisasi sebesar 75,85%. Hal itu dilihat dari Jumlah pemilih terdaftar 698.746 pemilih, sedangkan jumlah pengguna hak pilih 530.000 pemilih. Dengan demikian, persentase capaian pada indikator ini adalah 101%.
2. Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terealisasi sebesar 79,12%. Hal itu dilihat dari Jumlah pemilih terdaftar 708.964 pemilih, sedangkan jumlah pengguna hak pilih 560.898 pemilih. Dengan demikian, persentase capaian pada indikator ini adalah 105%.

Sasaran 21	<i>Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%
Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	1 dokumen	100%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014
KPU Kota Bogor melakukan monitoring persiapan pemungutan suara ke beberapa TPS sampel guna memantau kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara agar sesuai dengan petunjuk teknis. Dalam pelaksanaan monitoring, tim monitoring mencermati persiapan kelengkapan TPS dan dukungan kelengkapan TPS. Dengan demikian, informasi tentang kelengkapan TPS dapat segera diketahui dan apabila terdapat masalah maka dapat segera diselesaikan.
2. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014
KPU Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membentuk kelompok kerja rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara
- b. Menyiapkan bahan-bahan seperti berita acara dan dokumen rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 tingkat PPK
- c. Melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014
- d. Menyampaikan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 kepada KPU provinsi Jawa Barat.

Sasaran 22	<i>Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014</i>
-------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	1 laporan	1 laporan	100%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yaitu pada sub kegiatan fasilitasi persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014.

Sasaran 23	<i>Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%
Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	1 dokumen	100%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014;
2. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2014, KPU Kota Bogor mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 32.019.315.000,-, kemudian mengalami 7 kali revisi sebagai berikut:

1. Revisi 1, pagu anggaran sebesar Rp 32.019.615.000,-
2. Revisi 2, pagu anggaran sebesar Rp 37.197.139.000,-
3. Revisi 3, pagu anggaran sebesar Rp 37.197.139.000,-
4. Revisi 4, pagu anggaran sebesar Rp 37.183.579.000,-
5. Revisi 5, pagu anggaran sebesar Rp 28.535.869.000,-
6. Revisi 6, pagu anggaran sebesar Rp 28.535.869.000,-
7. Revisi 7, pagu anggaran sebesar Rp 28.535.869.000,-

Sedangkan jumlah penyerapan selama Tahun 2014 sebesar Rp. 23.904.427.556 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan	Pagu (Revisi 7)	Realisasi
1	2	3	4
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	46.975.000	44.465.705
2	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	106.044.000	77.269.950
3	Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan	1.181.541.000	1.074.274.494
4	Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu	890.000	0
5	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014	125.701.000	73.760.000
6	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014	5.160.142.000	2.854.943.298
7	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan (Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2015 dan RKA K/L TA 2015	21.094.000	19.248.000
8	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN KPU Tahun 2014)	3.650.000	3.163.000
9	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	138.815.000	67.550.000
10	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	65.776.000	54.787.000
11	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	348.254.000	225.470.420
12	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	75.050.000	39.068.750

No	Program / Kegiatan	Pagu (Revisi 7)	Realisasi
13	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1.765.000	1.590.000
14	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	1.800.000	1.800.000
15	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	111.011.000	66.426.500
16	Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	10.260.000	10.180.000
17	Dokumen Barang Milik Negara	27.431.000	18.450.000
18	Undang-undang/ Peraturan/ Keputusan	54.150.000	39.859.750
19	Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	83.600.000	60.181.000
20	Layanan Operasional Perkantoran Rutin	437.305.000	411.661.214
21	Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait Sengketa Pemilu	3.493.000	3.400.000
22	Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu	160.229.000	84.584.970
23	Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu	2.000.000	915.000
24	Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	44.568.000	36.506.750
25	Publikasi Informasi Pemilu	3.650.000	980.000
26	Laporan Kampanye Pemilu Legislatif 2014	41.260.000	38.959.300
27	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	18.889.103.000	17.715.819.625

No	Program / Kegiatan	Pagu (Revisi 7)	Realisasi
28	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	955.752.000	690.525.590
29	Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	3.960.000	3.960.000
30	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	186.598.000	144.273.450
31	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	43.550.000	2.556.640
32	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	30.384.000	12.933.450
33	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	170.068.000	24.863.700
JUMLAH		28.535.869.000	23.904.427.556

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU Kota Bogor telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 melalui pencapaian target dari indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor sendiri.

Pencapaian indikator kinerja yang paling signifikan terhadap sasaran strategis dan melampaui target meliputi:

1. Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014 mencapai 195%
2. Persentase kasus gugatan hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU mencapai 125 %
3. Dalam bidang Publikasi Informasi Pemilu, Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik mencapai 102 %
4. Persentase tingkat ingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 mencapai 101 % dan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mencapai 105 %
5. Perencanaan, penataan dan Distribusi logistik yang baik sehingga tidak ada surat suara yang tertukar seperti kebanyakan di daerah lain.
6. KPU Kota Bogor meraih Penghargaan sebagai KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi, yaitu:
 - a. Juara Tingkat Jawa Barat dalam 2 kategori yaitu Kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Kategori Pemilu Akses.
 - b. Juara Tingkat Nasional dalam Kategori Transparansi Informasi Pemilu.

Pencapaian tersebut di atas masuk ke dalam kategori sangat berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja. Adapun pencapaian yang cukup berhasil dalam arti kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja, adalah pada indikator Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum yaitu mencapai 86 %. Sedangkan kegiatan lainnya masuk dalam kategori berhasil karena mencapai 100%.

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2014 yang disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP ini diharapkan dapat menjadikan KPU Kota Bogor sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu pula dapat mewujudkan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat terpelihara.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada di Kota Bogor diberikan amanah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada, berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugasnya, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor. Sekretariat KPU Kota Bogor merupakan instansi pemerintah yang secara hierarki berada di bawah Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia (KPU RI).

Sebagai instansi Pemerintah, Sekretariat KPU Kota Bogor berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretariat KPU Kota Bogor wajib melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, penyusunan LAKIP didasari oleh semangat untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* yang salah satu indikatornya adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas berarti adanya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut salah satunya ialah penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

LAKIP dibuat sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, serta akhirnya diserahkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilihan umum harus memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas sehingga pemilihan umum dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Penyusunan LAKIP KPU Kota Bogor Tahun 2014 ini merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, berintegritas, profesional, dan akuntabel.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bogor tahun 2014 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bogor atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KOTA BOGOR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai penyelenggara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagai penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di tingkat Kota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi :
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kota;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggara di tingkat Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kota berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kota berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK;
 - 9) Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota dan KPU Provinsi;

- 10) Menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan mengumumkannya;
 - 11) Mengumumkan calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota dan membuat berita acaranya;
 - 12) Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - 13) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota;
 - 14) Menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan ketentuan perundang-undangan;
 - 15) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;
 - 16) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 17) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU KPU Provinsi dan atau undang-undang.
- b. Tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kota;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggara di tingkat Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja Kota;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggara oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja kota;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kota dan KPU Provinsi;
 - 9) Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - 10) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota;

- 11) Menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan ketentuan perundang-undangan;
 - 12) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;
 - 13) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 14) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU KPU Provinsi dan atau undang-undang.
- c. Tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS, dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota berdasarkan peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi;
 - 6) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - 7) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota;
 - 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 9) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota yang telah memenuhi syarat;
 - 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;

- 11) Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu kota dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- 14) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota ke KPU melalui KPU Provinsi;
- 15) Memeriksa pengaduan dan atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- 16) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota;
- 17) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota dan ketentuan perundang-undangan;
- 18) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat;
- 19) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan atau KPU Provinsi;
- 20) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 21) Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota; dan
- 22) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau Undang-undang.

2. Kewajiban

Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kota Bogor memiliki kewajiban yaitu meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan.

3. Kesekretariatan

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Bogor, maka KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor. Sekretariat KPU Kota Bogor bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Jenderal KPU.

Adapun tugas-tugas, fungsi-fungsi, wewenang, kewajiban dan susunan organisasi sekretariat KPU Kota Bogor yaitu sebagai berikut:

a. Tugas-tugas Sekretariat KPU Kota Bogor :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bogor;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor;
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi-fungsi Sekretariat KPU Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, fungsi Sekretariat KPU Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Bogor;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Bogor;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Bogor;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bogor;

- e. Membantu perumusan, penyusunan, dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Bogor;
- f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Bogor;
- h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Bogor;
- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Bogor;
- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor.

c. Wewenang Sekretariat KPU Kota Bogor :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bogor berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memberikan layanan administratif, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Bogor :

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- 3) Mengelola barang inventaris KPU Kota Bogor.

e. Tanggung jawab Sekretariat KPU Kota Bogor

Sekretariat KPU Kota Bogor bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor terdiri dari Sekretaris yang dibantu oleh subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Program dan Data

Uraian tugas pada subbagian Program dan Data yaitu:

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c) Mengelola, menyusun data Pemilih;
- d) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga pemerintahan lain yang terkait;

- e) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintahan;
- f) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- h) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU
- l) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada sekretariat KPU;
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris KPU;
- n) Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU;
- o) Menyusun dan merencanakan anggaran proses pergantian antar waktu anggota KPU;
- p) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Subbagian Hukum

Uraian tugas pada subbagian Hukum yaitu :

- a) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c) Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e) Menyusun dan mengelola bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f) Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- g) Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Bogor;
- h) Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k) Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;

- m) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian Hukum Kota Bogor;
- n) Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ;
- p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;
- q) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum Kota Bogor;
- r) Melaksanakan inventarisasi peraturan Perundang-undangan;
- s) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas pada subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yaitu :

- a) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Bogor;
- b) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor;
- c) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d) Mengumpulkan dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Bogor;
- f) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h) Menyusun draf pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j) Menyusun draf tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l) Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m) Menginventarisasi semua permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- o) Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;

- p) Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q) Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
- r) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

a) Uraian tugas pada subbagian Keuangan yaitu :

- (1) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
- (2) Memberikan informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota;
- (3) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan Keuangan;
- (4) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ / LPAK);
- (5) Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- (6) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- (7) Menyusun dan membuat daftar gaji/ honor pegawai;
- (8) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- (9) Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah dilakukan oleh PPK dan telah diselesaikan oleh KPPN;
- (10) Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (11) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
- (12) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- (13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- (14) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ;
- (15) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- (16) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor ;
- (17) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- (18) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b) Uraian tugas pada subbagian Umum yaitu :

- (1) mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;

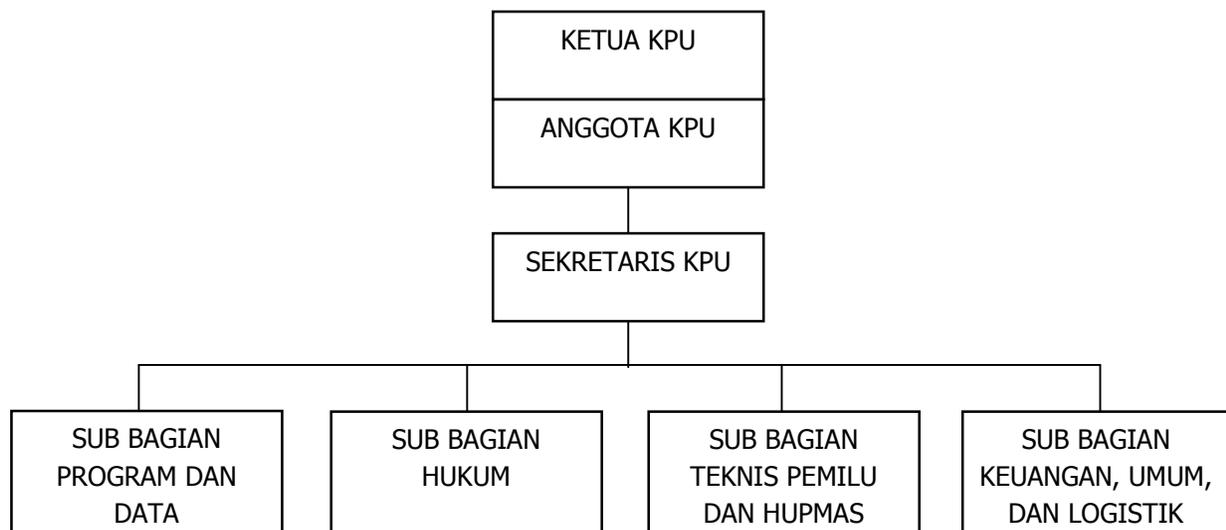
- (2) menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat dan ekspedisi;
- (3) menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- (4) menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- (5) menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- (6) mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- (7) menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- (8) menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- (9) menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- (10) menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- (11) mengumpulkan dan penyusunan arsip in- aktif;
- (12) mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- (13) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (14) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (15) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (16) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- (17) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c) Uraian tugas pada subbagian Logistik yaitu :

- (1) mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
- (2) menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- (3) mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- (4) mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- (5) menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- (6) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (7) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (8) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Bogor;
- (9) mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- (10) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi KPU Kota Bogor sebagai berikut:



Gambar 1.1 struktur organisasi KPU Kota Bogor

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan Kinerja, Kendala yang dihadapi, strategi pemecahan masalah

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, wewenang dan kewajiban; struktur organisasi dan sistematika laporan.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan Rencana Strategis 2010-2014, Rencana Kinerja Tahun 2014, Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pengukuran dan capaian kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran yang juga menguraikan program/kegiatan dan akuntabilitas keuangan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2010-2014, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi KPU adalah sebagai berikut:

Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing- masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang Profesional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Disamping itu relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah:

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;

2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai undang-undang;
4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya;
2. Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia, pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya;
3. Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang terselesaikan;
4. Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk masuk dalam data pemilih; dan
5. Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan hasil pemetaan masing-masing daerah.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

KPU Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2014. Rencana Kinerja Tahun 2014 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2010-2014 yaitu:

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel	Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3 dokumen
		Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	12 bulan layanan
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	1 dokumen
3	Meningkatnya efektivitas pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan	8 dokumen
4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Logistik Pemilu	Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu	5 paket
5	Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen usulan RENJA dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	2 laporan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	1 dokumen
8	Terlindunginya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Tahun 2014	Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam Proses Penghitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 yang berbasis teknologi	Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	100%
10	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan
		Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang
		Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	33 orang
11	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	2 jenis
		Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor	2 jenis
12	Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik	Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	100%
		Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu	1 laporan
		Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK	1 laporan
		Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor	100%
13	Tersusunnya dokumentasi arsip Tahapan Pemilu di KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	1 dokumen
14	Terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam Rangka Pemilu Tahun 2014	Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali
15	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bogor	Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%
		Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%
16	Terwujudnya KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	80%
		Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	7 kategori
		Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol
17	Terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pemilu	Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	90%
18	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	1 laporan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
19	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu terkait teknis penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014	Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	80%
20	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	75%
		Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	75%
21	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	1 laporan
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen
22	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	1 laporan
23	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan
		Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen

C. PENETAPAN KINERJA 2014

Pada Bulan Februari 2014, KPU Kota Bogor membuat Penetapan Kinerja (TAPKIN) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2014 sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel	Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	46.975.000
		Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3 dokumen	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	106.044.000
		Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	12 bulan layanan	Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan	947.541.000
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	1 dokumen	Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu	890.000
3	Meningkatnya efektivitas pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan	8 dokumen	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014	123.061.000
4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Logistik Pemilu	Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu	5 paket	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014	5.420.462.000

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Pagu
5	Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen usulan RENJA dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan (Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2015 dan RKA K/L TA 2015	21.094.000
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	2 laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN KPU Tahun 2014)	3.650.000
7	Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	1 dokumen	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	138.815.000
		Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	1 dokumen	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	43.478.000
8	Terlindunginya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Tahun 2014	Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	257.640.000
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam Proses Penghitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 yang berbasis teknologi	Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	100%	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	75.050.000
10	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	900.000
		Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	1.800.000
		Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	33 orang	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	117.284.000
11	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	2 jenis	Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	10.260.000
		Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor	2 jenis		

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Pagu
12	Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik	Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	100%	Dokumen Barang Milik Negara	27.431.000
		Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu	1 laporan		
		Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK	1 laporan		
		Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor	100%		
13	Tersusunnya dokumentasi arsip Tahapan Pemilu di KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	1 dokumen	Undang-undang/ Peraturan/ Keputusan	54.150.000
14	Terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam Rangka Pemilu Tahun 2014	Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali	Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	83.600.000
15	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bogor	Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%	Layanan Operasional Perkantoran Rutin	412.305.000
		Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%		
16	Terwujudnya KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	80%	Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait Sengketa Pemilu	3.493.000
		Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	7 kategori	Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu	100.498.000
		Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol	Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu	2.000.000
		Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol	Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	44.568.000
17	Terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pemilu	Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	90%	Publikasi Informasi Pemilu	3.650.000
18	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	1 laporan	Laporan Kampanye Pemilu Legislatif d 2014	36.310.000

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Pagu
19	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu terkait teknis penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014	Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	80%	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	22.481.673.000
20	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	75%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	996.145.000
		Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	75%		
21	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	1 laporan	Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	28.248.000
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	186.598.000
22	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	1 laporan	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	43.550.000
23	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	30.384.000
		Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	170.068.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2014, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2010-2014. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2014 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Bogor secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Skala kategori penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Rentang Nilai (dalam persen)	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Sedangkan perbandingan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3 dokumen	3 dokumen	100%
3	Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
4	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan	8 dokumen	8 dokumen	100%
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu	5 paket	5 paket	100%
7	Jumlah dokumen usulan RENJA dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen	1 dokumen	100%
8	Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	2 laporan	2 laporan	100%
9	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100%
10	Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
11	Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	96,85%	96,85%
12	Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	100%	100%	100%
13	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	1 laporan	100%
14	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang	2 orang	100%
15	Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	33 orang	33 orang	100%
16	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	2 jenis	2 jenis	100%
17	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor	2 jenis	1 jenis	50%
18	Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	100%	100%	100%
19	Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%
20	Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK	1 laporan	1 laporan	100%
21	Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor	100%	100%	100%
22	Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	100%
23	Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali	39 kali	195%
24	Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%	90%	100%
25	Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%	100%	100%
26	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	80%	100%	125%
27	Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	7 kategori	6 kategori	86%
28	Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol	12 parpol	100%
29	Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	90%	92%	102%
30	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	2 laporan	2 laporan	100%
31	Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	80%	80%	100%
32	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	75%	75,85	101%
33	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	75%	79,12	105%
34	Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%
35	Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	1 dokumen	100%
36	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	1 laporan	1 laporan	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
37	Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%
38	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	1 dokumen	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Bogor secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2014. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bogor pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	<i>Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel</i>
------------------	---

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	1 Laporan	100
Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3 dokumen	3 dokumen	100
Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100

Capaian indikator kinerja di atas dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014
3. Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan

Pencapaian sasaran pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor di ukur dari outcome sasaran tersebut yaitu berupa ketepatan dari segi waktu dan kualitas pelaporan keuangan yang disajikan tiap bulannya dan juga ketepatan dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran seperti pembayaran gaji pegawai, honor dan tunjangan pegawai lainnya.

Sekretariat KPU Kota Bogor mengadministrasikan seluruh proses-proses keuangan baik transaksi rutin atau pun transaksi untuk keperluan pemilu didasarkan ketentuan keuangan yang berlaku, sehingga kualitas pelaporan keuangan Sekretariat KPU Kota Bogor dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang dibuat oleh KPU Kota Bogor meliputi:

1. Laporan Keuangan (SAI/SAKPA);
2. Laporan Rekonsiliasi;

3. Laporan Pajak;
4. Laporan Bendahara (BKU dan Pembantunya);
5. Laporan Realisasi;
6. Laporan Pengawasan Anggaran;
7. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara berupa bukti-bukti pengeluaran belanja.

Sasaran 2	<i>Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu</i>
------------------	--

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, beberapa langkah yaitu :

1. KPU Kota Bogor telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk menyusun kebutuhan logistik pemilu 2014.
2. Menyusun rencana kebutuhan logistik dengan menentukan harga satuan aset logistik secara wajar

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 1 (satu) rencana kebutuhan logistik yang berisi harga satuan aset logistik yang wajar untuk keperluan pemilu 2014.

Sasaran 3	<i>Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu</i>
------------------	--

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan dan tepat waktu	8 dokumen	8 dokumen	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014 melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu
2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik pemilu
3. Melakukan pengelolaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilu untuk memetakan kebutuhan dan distribusi logistik untuk pemilu 2014

4. Melakukan fasilitasi pengadaan logistik pemilu melalui :
 - a. koordinasi pengadaan logistik pemilu dan melaporkan hasilnya melalui aplikasi SILOG dan media komunikasi lainnya
 - b. pengawasan proses produksi penyedia barang/jasa yang pengadaan dan pembiayaannya masuk ke dalam DIPA KPU Kota Bogor
5. Melakukan fasilitasi distribusi logistik pemilu dengan melakukan monitoring pengiriman logistik pemilu dari KPU Kota Bogor ke PPK, PPS dan TPS
6. Untuk mendapatkan pedoman tindak lanjut logistik pemilu pasca pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kota Bogor mengikuti bimbingan teknis pengelolaan aset logistik pemilu ke KPU Provinsi
7. Melakukan penghapusan logistik eks pemilu
8. Melakukan *stock opname* logistik pemilu

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 8 (delapan) dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen penyusunan rencana kegiatan dan evaluasi pengelolaan logistik
- b. Dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik pemilu
- c. Dokumen pengelolaan Sistem Informasi Logistik (SILOG)
- d. Dokumen fasilitasi pengadaan logistik
- e. Dokumen fasilitasi distribusi logistik pemilu
- f. Dokumen hasil kegiatan perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis pengelolaan aset logistik pemilu ke KPU Provinsi
- g. Dokumen penghapusan logistik eks pemilu
- h. Dokumen *stock opname* logistik pemilu

Sasaran 4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Logistik Pemilu
------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu yang dapat diimplementasikan dan tepat waktu	5 paket	5 paket	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014 melalui pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Tahun 2014. Pengadaan logistik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan ATK untuk kelengkapan TPS pada Pemilu Legislatif, antara lain: spidol besar, spidol kecil, ballpoint, lem perekat, tali pengikat pemberi tanda pilihan, kantong plastik besar dan kecil, karet/tali pengikat.
2. Paket Pengadaan material untuk kelengkapan TPS pada Pemilu Legislatif, antara lain: mur

dan baut kotak suara, gembok dan anak kunci, bantalan/alat coblos, paku/alat coblos.

3. Paket Pengadaan cetakan untuk kelengkapan TPS pada Pemilu Legislatif, antara lain: tanda pengenal KPPS, tanda pengenal saksi, tanda pengenal keamanan TPS, Sticker kotak suara.
4. Paket Pengadaan ATK dan Cetakan untuk kelengkapan TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, antara lain: spidol besar, spidol kecil, ballpoint, lem perekat, tali pengikat pemberi tanda pilihan, kantong plastik besar dan kecil, karet/tali pengikat, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal saksi, tanda pengenal keamanan TPS, Sticker kotak suara.
5. Paket Pengadaan material untuk kelengkapan TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, antara lain: gembok dan anak kunci, bantalan/alat coblos, paku/alat coblos.

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 5 (lima) paket pengadaan sebagaimana uraian di atas.

Sasaran 5	<i>Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor</i>
------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Dokumen usulan RENJA TA 2015 dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen	1 dokumen	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan melalui kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2015 dan RKA K/L TA 2015 yang memuat kebutuhan anggaran yang terdiri dari belanja mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran) dan belanja tidak mengikat untuk tahun anggaran 2015 serta anggaran yang berasal dari Hibah APBD. Untuk melaksanakan kegiatan ini, KPU Kota Bogor mengikuti rapat koordinasi penyusunan RENJA dan RKA K/L di KPU Provinsi dalam rangka penyusunan usulan kegiatan dan rencana kerja anggaran tahun 2015. Usulan ini kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU RI.

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 1 (satu) dokumen RENJA dan RKA K/L TA 2015.

Sasaran 6	<i>Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, efektif dan efisien</i>
------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	2 laporan	2 laporan	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN KPU Tahun 2014) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Penyusunan LAKIP dan TAPKIN
2. Menyusun Indikator Kinerja
3. Menyusun proses pelaksanaan kegiatan penyusunan LAKIP
4. Menyusun LAKIP dan TAPKIN serta menyampaikannya kepada KPU Provinsi pada bulan Februari 2014

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, yaitu berupa 2 (dua) laporan, meliputi LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN Tahun 2014.

Sasaran 7	Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Kota Bogor
------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100
Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	1 dokumen	1 dokumen	100

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014
2. Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014

Kegiatan Dokumen bidang penganggaran pemilu dilaksanakan dengan cara melakukan penyusunan program dan anggaran. Penyusunan program dan anggaran dilakukan melalui sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu. Langkah-langkah koordinasi yang dilakukan antara lain:

- a. Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran
- b. Menelaah kembali DIPA dan RKA K/L yang telah diterbitkan, mencakup program, kegiatan, output, komponen, sub komponen serta jenis belanja kegiatan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden Tahun 2014
- c. Mengidentifikasi permasalahan
- d. Melakukan revisi DIPA sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi RKA K/L Tahun 2014
- f. Melakukan rekrutmen tenaga *outsourcing*

Sedangkan kegiatan penyusunan Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014 dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Penyusunan Laporan Tahapan Pemilu 2014 TA 2014.

b. Melakukan penyusunan Laporan Tahapan Pemilu

Dengan demikian, realisasi target dalam indikator kinerja pada sasaran ini sebagai berikut:

- a. Pada indikator Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu, realisasi targetnya berhasil dicapai yaitu berupa 1 (satu) dokumen perencanaan dan penganggaran meliputi dokumen revisi DIPA yang termuat dalam dokumen Laporan Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran;
- b. Pada indikator Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Pemilu yang informatif, realisasi targetnya berhasil dicapai yaitu berupa 1 (satu) dokumen Buku Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2014, meliputi buku laporan tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Tahapan Pemilu Presiden Tahun 2014.

Sasaran 8	<i>Terlindunginya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Tahun 2014</i>
------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	96,85%	96,85

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Updating dan kompilasi Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
2. Sosialisasi dan Implementasi PKPU Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan lainnya
3. Rapat Koordinasi dengan PPK dan PPS dalam rangka pemutakhiran data pemilih
4. Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI
5. Menghadiri Bimtek dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI
6. Melakukan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan menggunakan aplikasi SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), baik pada proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran ini adalah 96,85% untuk Pemilu Tahun 2014. Angka tersebut merupakan persentase rata-rata dari persentase data pemilih yang akurat pada Pemilu Legislatif sebesar 96,83% dengan Pemilu Peresiden dan Wakil Presiden sebesar 96,86%. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 666.124 orang, sedangkan jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) atau pemilih yang menggunakan KTP/Paspor saat pemungutan suara sebanyak 21.101 orang. Pemilih dalam

DPKTb tersebut menggunakan KTP/Paspor saat pemungutan suara karena tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa persentase akurasi data pemilih dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah sebesar 96,83%.

2. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 680.176 orang, sedangkan jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) atau pemilih yang menggunakan KTP/Paspor saat pemungutan suara sebanyak 21.352 orang. Pemilih dalam DPKTb tersebut menggunakan KTP/Paspor saat pemungutan suara karena tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa persentase akurasi data pemilih dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebesar 96,83%

Dengan demikian, Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebesar 96,85%.

Sasaran 9	<i>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam Proses Penghitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 yang berbasis teknologi</i>
------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	100%	100%	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014 yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyediakan infrastruktur jaringan, fasilitas internet dan data center
2. Mengikuti bimbingan teknis aplikasi Sistem Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2014 (Situng)
3. Melakukan input/entry data C1 ke dalam aplikasi Situng dan memindai (scan) data C1 tersebut sebagai data gambar yang menjadi database pendukungnya. Entry data dan scan tersebut dilakukan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Mengirimkan hasil entry dan scan C1 ke KPU RI secara elektronik.

Realisasi target kinerja pada indikator Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu 100 %, artinya seluruh formulir C1, baik pada Pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, berhasil diinput ke dalam Aplikasi Situng sesuai dengan arahan dari KPU RI.

Sasaran 10	<i>Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	1 laporan	100%
Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang	2 orang	100%
Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	33 orang	33 orang	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yaitu pada Tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelantikan 1 (satu) orang pejabat struktural yaitu Kasubag Hukum
 - b. Kenaikan Pangkat bagi 2 (dua) orang PNS Organik TMT April 2014
 - c. Kenaikan gaji berkala PNS Organik sebanyak 7 (tujuh) orang.

2. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM, yaitu:

Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan diklat teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM yang diikuti oleh 2 (dua) orang pegawai, yaitu (satu) orang Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik serta 1 (satu) orang staff keuangan

3. Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014, yaitu:

Bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis s.d Sabtu / 20 s.d 22 Maret 2014

Tempat : Pajajaran Suite Resort and Convention Hotel

Jl. Bogor Inner Ring Road No. 17 Bogor Nirwana Residence (BNR)
Bogor

Peserta : 33 (tiga puluh tiga) orang, terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner KPU Kota Bogor dan 28 (dua puluh delapan) orang dari Sekretariat KPU Kota Bogor.

Narasumber : 5 (lima) orang, yaitu:

- a. Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat (Endun Abdul Hq, M. Pd)
- b. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat (Heri Suherman, SH)
- c. Anggota Tim Pemeriksa Daerah Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Barat (Drs. Affan Sulaeman, M. A)
- d. Anggota Panwaslu Kota Bogor (Sasongko S. Putro, M.Si.)
- e. Wakapolres Bogor Kota (M. Santoso, S.IK)

Pada sasaran ini, terdapat penambahan kegiatan yaitu berupa kegiatan Piagam Penghargaan bagi Penyelenggara Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pemberian Penghargaan/Award bagi Penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat memberikan penghargaan kepada KPU di daerah yang dinilai berprestasi dalam menggelar Pemilihan Umum 2014.

Pada tingkat KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bogor meraih juara untuk dua kategori yaitu kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Pemilu Akses. Ada 6 (enam) kategori dalam penghargaan Penyelenggaraan Pemilu Berprestasi di Provinsi Jawa Barat kali ini, yaitu Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu, Transparansi Informasi Pemilu, Daftar Pemilih Berkualitas, Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas, Iklan Layanan Masyarakat Kreatif dan Pemilu Akses.

Dalam Lomba tingkat KPU Provinsi Jawa Barat ini, KPU Kabupaten/Kota lain hanya mendapat satu kategori dan hanya KPU Kota Bogor yang meraih dua kategori sekaligus, yaitu kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Pemilu Akses pada Pemilu 2014. Kabupaten/Kota lain yang mendapat penghargaan KPU Awards diantaranya, KPU Tasikmalaya masuk dalam kategori penghargaan Iklan Layanan Masyarakat Kreatif, KPU Kabupaten Sumedang kategori Daftar Pemilih Berkualitas, KPU Kabupaten Majalengka berhasil menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemilu Berintegritas dan KPU Kota Bandung meraih penghargaan Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu.

Pada tingkat KPU pusat, KPU Kota Bogor mendapatkan penghargaan sebagai KPU Kab/Kota berprestasi tingkat Nasional kategori Transparansi Informasi Pemilu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 di Ecopark Ancol, dalam acara Koordinasi Nasional KPU, KPU/KIP Povinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan penghargaan KPU Awards.

Prestasi ini merupakan capaian yang membanggakan bagi KPU Kota Bogor dalam penyelenggaraan pemilu. Prestasi ini diperoleh melalui perjuangan dan kerja keras segenap sumber daya manusia di KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu.

Sasaran 11	<i>Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	2 jenis	2 jenis	100%
Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor	2 jenis	2 jenis	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran, berupa pembinaan dan pengelolaan tata usaha kearsipan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penataan arsip Pemilu dan pemilukada
2. Melakukan penyelamatan arsip pemilu/pemilukada permanen kepada Lembaga Arsip Kota Bogor

Dengan demikian, realisasi pencapaian target kinerja pada indikator di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib, realisasi targetnya berhasil dicapai yaitu 2 (dua) jenis berupa arsip pemilu dan pemilukada
2. Pada indikator Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor, realisasi targetnya berhasil dicapai yaitu 2 jenis berupa:
 - a. Surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013
 - b. Formulir-formulir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 baik di tingkat TPS (Formulir model C), PPS (Formulir model D) maupun PPK (DA).

Sasaran 12	Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	100%	100%	100%
Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%
Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK	1 laporan	1 laporan	100%
Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor	100%	100%	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Dokumen Barang Milik Negara, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengelolaan BMN, antara lain: pengelolaan BMN melalui SIMAK BMN, penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Kota Bogor sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi dan *stock opname* persediaan untuk setiap periode pelaporan, menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN), melakukan konsolidasi ADK dengan KPU/KIP Provinsi sebagai UAPPB-W, dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB.
2. Penghapusan BMN yang rusak berat
3. Tuntutan Ganti Rugi, yaitu berupa 1 unit kendaraan dinas roda 4.

Berdasarkan laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil *stock opname*, jumlah kotak suara sebanyak 11.649 unit, yang terdiri dari kotak suara kondisi baik sebanyak 10799 unit dan kotak suara rusak sebanyak 850 unit. Sedangkan jumlah bilik suara sebanyak 2.062 unit, yang terdiri dari bilik suara kondisi baik sebanyak 2.651 unit, kotak suara rusak sebanyak 403 unit dan hilang sebanyak 8 unit. Adapun Jumlah Barang Milik Negara yang dilakukan TGR adalah mobil dinas yang hilang sebanyak 1 unit.

Sasaran 13	Tersusunnya dokumentasi arsip Tahapan Pemilu di KPU Kota Bogor
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan pendokumentasian arsip Undang-undang/peraturan/keputusan terkait pemilu. dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Penyusunan Dokumentasi Arsip Tahapan Pemilu
2. Melakukan pengumpulan produk hukum terkait tahapan pemilu
3. Melakukan klasifikasi produk hukum terkait tahapan pemilu berdasarkan tingkatannya, antara lain: Undang-undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat dan Keputusan KPU Kota Bogor.

Dengan demikian, realisasi pencapaian target kinerja pada indikator di atas adalah 100 % yaitu 1 dokumen.

Sasaran 14	<i>Terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam Rangka Pemilu Tahun 2014</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali	39 kali	195 %

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat dengan Instansi terkait terutama Kepolisian tentang Perencanaan dan pelaksanaan tugas Pengamanan kegiatan Tahapan Pemilu dan menjembatani keperluan dalam hal berkoordinasi dibidang Pengamanan dalam Pengamanan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan asset gedung kantor Komisi Pemilihan Umum.
2. Melakukan rapat dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, yaitu:
 - a. Disdukcapil, terutama terkait NIK dalam Daftar Pemilih;
 - b. Kesbangpol, terutama terkait kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, kampanye dan kegiatan tahapan;
 - c. DLLAJ, terutama terkait pelaksanaan kampanye rapat umum, sosialisasi yang melibatkan massa dan jalur jalan umum seperti gerak jalan sehat dan pawai keliling dan kegiatan lainnya;

- d. Sat Pol PP, terutama terkait kampanye, sosialisasi, penertiban alat peraga kampanye;
- e. LAPAS Paledang, terkait pemilih warga binaan LAPAS dan TPS di dalam LAPAS;
- f. Kecamatan dan kelurahan, terkait semua tahapan pemilu.

Jumlah kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor adalah sebanyak 39 kali, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi tentang Zona Kampanye Pileg sebanyak 3 kali;
2. Koordinasi tentang Lapangan Kampanye Pileg sebanyak 7 kali;
3. Koordinasi Pengamanan Logistik Pileg sebanyak 1 kali;
4. Koordinasi dalam rangka Kunjungan Kapolda Jabar terkait pengamanan pemilu sebanyak 1 kali;
5. Deklarasi Kampanye Damai Pileg sebanyak 1 kali;
6. Pawai kampanye damai Pileg sebanyak 1 kali;
7. Rapat koordinasi persiapan gerak jalan sehat sebanyak 2 Kali;
8. Gerak jalan sehat sebanyak 2 kali;
9. Pengamanan saat pelipatan surat suara pileg sebanyak 1 kali;
10. Pengamanan pemberangkatan surat suara Pileg ke PPK sebanyak 1 kali;
11. Rakor penghapusan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1 kali;
12. Pelaksanaan penghapusan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1 kali;
13. Pengamanan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2014 sebanyak 1 kali
14. Pengamanan pemberangkatan kotak suara dari KPU Kota Bogor ke KPU Provinsi pada Pileg sebanyak 1 kali;
15. Pengamanan Rapat Pleno terbuka penetapan perolehan suara dan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 sebanyak 1 kali;
16. Pengamanan saat pelipatan surat suara Pilpres sebanyak 1 kali;
17. Fasilitasi Kampanye Pilpres sebanyak 4 kali;
18. Pengamanan logistik Pilpres sebanyak 1 kali;
19. Pengamanan pemberangkatan surat suara Pileg ke PPK sebanyak 1 kali;
20. Pengamanan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres sebanyak 1 kali;
21. Pemberangkatan kotak suara dari KPU Kota Bogor ke KPU Provinsi pada Pilpres sebanyak 1 kali;
22. Pengamanan saat pelipatan surat suara pilpres sebanyak 1 kali;
23. Koordinasi dengan Disdukcapil terkait NIK dalam daftar pemilih sebanyak 2 kali;
24. Koordinasi dengan LAPAS terkait pemilih warga binaan LAPAS sebanyak 2 kali.

Sasaran 15	<i>Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bogor</i>
-------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%	90%	100%
Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%	100%	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Layanan Operasional Perkantoran Rutin dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. kebutuhan sehari-hari perkantoran seperti: honor satpam/sopir, honor petugas kebersihan/pramubakti, ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan koran dan air minum pegawai;
2. Langganan daya dan Jasa seperti: belanja pengiriman surat dinas, langganan listrik, telepon dan air;
3. Pemeliharaan kantor, seperti biaya pemeliharaan gedung dan pemeliharaan peralatan dan mesin (servis kendaraan roda 4, AC, PC, printer dan barang inventaris lainnya)
4. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor seperti: honor operasional satuan kerja, pakaian dinas, perjalanan dinas ke KPPN dan Kanwil dan honor pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan.

Sasaran 16	<i>Terwujudnya KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel</i>
-------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	80%	100%	125%
Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	7 kategori	6 kategori	86%
Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol	12 parpol	100%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait Sengketa Pemilu
2. Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu
3. Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu

4. Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU terealisasi sebanyak 100 %, yaitu 2 kasus gugatan, yaitu PDIP untuk DPRD Kota Bogor dan PAN untuk DPR RI. Dengan demikian, persentase capaian pada indikator kinerja ini adalah 125 %.
2. Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum yang terealisasi adalah sebanyak 6 kategori, yaitu Formulir C, Formulir D, Formulir DA, Formulir DB, Formulir EB dan SK Penetapan Calon Terpilih. Dengan demikian, persentase capaian pada indikator ini adalah 86 %.
3. Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu adalah 12 parpol. Dengan demikian persentase capaian pada indikator ini adalah 100 %.

Sasaran 17	<i>Terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pemilu</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	90%	92%	102%

Untuk Mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Publikasi Informasi Pemilu melalui pengembangan PPID dan pusat informasi pemilu yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan, pengumpulan dan updating data pemilu
2. Melakukan pelayanan data dan informasi bagi masyarakat yang meminta informasi dan data.

Adapun langkah-langkah atau prosedur permintaan informasi sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat,email,telepon);
2. Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek / jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan;
3. Petugas Informasi Komisi Pemilihan Umum mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2;
4. Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan;
5. PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja (permohonan informasi umum).

Sepanjang tahun 2014, terdapat 47 permintaan, terdiri dari permintaan informasi yang

dilakukan secara langsung mendatangi kantor KPU Kota Bogor oleh peminta informasi sebanyak 36 permintaan, permintaan informasi dengan cara mengirimkan surat permohonan informasi sebanyak 11 permintaan. Sesuai dengan prosedur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, peminta informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek / jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. Peminta informasi yang datang langsung ke kantor KPU Kota Bogor mengisi formulir permintaan informasi.

Sedangkan untuk informasi yang diminta melalui internet (email dan media sosial) kurang lebih sebanyak 4 permintaan. Namun permintaan melalui internet tidak dapat terpenuhi secara optimal karena adanya keterbatasan dalam transfer data elektronik dan ada beberapa peminta informasi yang identitasnya (nama dan alamat) kurang jelas maupun ada yang tidak mencantumkan identitas asli.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik adalah 92%. Oleh karena itu persentase capaian indikator ini adalah 102%.

Sasaran 18	<i>Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Legislatif 2014</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	1 laporan	1 laporan	100%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Laporan Kampanye Pemilu 2014 yang isinya terdiri dari kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014. Dengan demikian, realisasi capaian indikator kinerja telah terpenuhi 1 laporan atau 100%.

Sasaran 19	<i>Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu terkait teknis penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	80%	80%	100%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU di Kota Bogor berupa Bimbingan Teknis Pemungutan dan

Penghitungan Suara yaitu sebagai berikut:

1. KPU Kota Bogor melakukan bimtek kepada Ketua dan Anggota PPK sebanyak 30 orang, yaitu:
 - a. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014
Waktu dan tempat Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal	:	Senin / 24 Maret 2014
Pukul	:	08.00 s.d 16.30 WIB
Tempat	:	Aula KPU Kota Bogor
 - b. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
Waktu dan tempat Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal	:	Minggu / 22 Juni 2014
Pukul	:	08.00 s.d 13.00 WIB
Tempat	:	Saung Hejo Jl. Raya Pakuan No. 15 Bogor
 - c. PPK melakukan bimtek kepada Ketua dan Anggota PPS
 - d. PPS melakukan bimtek kepada Anggota KPPS.

Sasaran 20	<i>Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014</i>
-------------------	--

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	75%	75,85%	101%
Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	75%	79,12%	105%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014 melalui sub kegiatan berikut:

1. Penyebaran informasi pemilu melalui media massa dan elektronik
2. Pengadaan bahan penyebaran informasi pemilu
3. Fasilitasi media dan media center
4. Publikasi dan pewartaan informasi tahapan pemilu
5. Pengumpulan dan pengolahan ulasan pers
6. Pendidikan pemilih pemilu melalui kegiatan:
 - a. Konsolidasi nasional

- b. Kirab/karnaval
- c. Relawan demokrasi
- d. Pemantau pemilu
- e. Gerak jalan sehat

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 terealisasi sebesar 75,85%. Hal itu dilihat dari Jumlah pemilih terdaftar 698.746 pemilih, sedangkan jumlah pengguna hak pilih 530.000 pemilih. Dengan demikian, persentase capaian pada indikator ini adalah 101%.
2. Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terealisasi sebesar 79,12%. Hal itu dilihat dari Jumlah pemilih terdaftar 708.964 pemilih, sedangkan jumlah pengguna hak pilih 560.898 pemilih. Dengan demikian, persentase capaian pada indikator ini adalah 105%.

Sasaran 21	<i>Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100%
Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	1 dokumen	100%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014
KPU Kota Bogor melakukan monitoring persiapan pemungutan suara ke beberapa TPS sampel guna memantau kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara agar sesuai dengan petunjuk teknis. Dalam pelaksanaan monitoring, tim monitoring mencermati persiapan kelengkapan TPS dan dukungan kelengkapan TPS. Dengan demikian, informasi tentang kelengkapan TPS dapat segera diketahui dan apabila terdapat masalah maka dapat segera diselesaikan.
2. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014
KPU Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membentuk kelompok kerja rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara
- b. Menyiapkan bahan-bahan seperti berita acara dan dokumen rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 tingkat PPK
- c. Melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014
- d. Menyampaikan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 kepada KPU provinsi Jawa Barat.

Sasaran 22	<i>Terseleenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	1 laporan	1 laporan	100%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yaitu pada sub kegiatan fasilitasi persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014.

Sasaran 23	<i>Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan</i>
-------------------	---

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%
Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	1 dokumen	100%

Untuk mencapai sasaran di atas, KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014;
2. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2014, KPU Kota Bogor mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 32.019.315.000,-, kemudian mengalami 7 kali revisi sebagai berikut:

1. Revisi 1, pagu anggaran sebesar Rp 32.019.615.000,-
2. Revisi 2, pagu anggaran sebesar Rp 37.197.139.000,-
3. Revisi 3, pagu anggaran sebesar Rp 37.197.139.000,-
4. Revisi 4, pagu anggaran sebesar Rp 37.183.579.000,-
5. Revisi 5, pagu anggaran sebesar Rp 28.535.869.000,-
6. Revisi 6, pagu anggaran sebesar Rp 28.535.869.000,-
7. Revisi 7, pagu anggaran sebesar Rp 28.535.869.000,-

Sedangkan jumlah penyerapan selama Tahun 2014 sebesar Rp. 23.904.427.556 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan	Pagu (Revisi 7)	Realisasi
1	2	3	4
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	46.975.000	44.465.705
2	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	106.044.000	77.269.950
3	Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan	1.181.541.000	1.074.274.494
4	Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu	890.000	0
5	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014	125.701.000	73.760.000
6	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014	5.160.142.000	2.854.943.298
7	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan (Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2015 dan RKA K/L TA 2015	21.094.000	19.248.000
8	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN KPU Tahun 2014)	3.650.000	3.163.000
9	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	138.815.000	67.550.000
10	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	65.776.000	54.787.000
11	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	348.254.000	225.470.420
12	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	75.050.000	39.068.750

No	Program / Kegiatan	Pagu (Revisi 7)	Realisasi
13	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1.765.000	1.590.000
14	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	1.800.000	1.800.000
15	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	111.011.000	66.426.500
16	Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	10.260.000	10.180.000
17	Dokumen Barang Milik Negara	27.431.000	18.450.000
18	Undang-undang/ Peraturan/ Keputusan	54.150.000	39.859.750
19	Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	83.600.000	60.181.000
20	Layanan Operasional Perkantoran Rutin	437.305.000	411.661.214
21	Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait Sengketa Pemilu	3.493.000	3.400.000
22	Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu	160.229.000	84.584.970
23	Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu	2.000.000	915.000
24	Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	44.568.000	36.506.750
25	Publikasi Informasi Pemilu	3.650.000	980.000
26	Laporan Kampanye Pemilu Legislatif 2014	41.260.000	38.959.300
27	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	18.889.103.000	17.715.819.625

No	Program / Kegiatan	Pagu (Revisi 7)	Realisasi
28	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	955.752.000	690.525.590
29	Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	3.960.000	3.960.000
30	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	186.598.000	144.273.450
31	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	43.550.000	2.556.640
32	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	30.384.000	12.933.450
33	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	170.068.000	24.863.700
JUMLAH		28.535.869.000	23.904.427.556

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU Kota Bogor telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 melalui pencapaian target dari indikator kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor sendiri.

Pencapaian indikator kinerja yang paling signifikan terhadap sasaran strategis dan melampaui target meliputi:

1. Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014 mencapai 195%
2. Persentase kasus gugatan hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU mencapai 125 %
3. Dalam bidang Publikasi Informasi Pemilu, Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik mencapai 102 %
4. Persentase tingkat ingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 mencapai 101 % dan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mencapai 105 %
5. Perencanaan, penataan dan Distribusi logistik yang baik sehingga tidak ada surat suara yang tertukar seperti kebanyakan di daerah lain.
6. KPU Kota Bogor meraih Penghargaan sebagai KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi, yaitu:
 - a. Juara Tingkat Jawa Barat dalam 2 kategori yaitu Kategori Transparansi Informasi Pemilu dan Kategori Pemilu Akses.
 - b. Juara Tingkat Nasional dalam Kategori Transparansi Informasi Pemilu.

Pencapaian tersebut di atas masuk ke dalam kategori sangat berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja. Adapun pencapaian yang cukup berhasil dalam arti kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja, adalah pada indikator Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum yaitu mencapai 86 %. Sedangkan kegiatan lainnya masuk dalam kategori berhasil karena mencapai 100%.

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2014 yang disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP ini diharapkan dapat menjadikan KPU Kota Bogor sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu pula dapat mewujudkan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat terpelihara.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN
LAKIP TAHUN 2014
KPU KOTA BOGOR

LAMPIRAN 1

RENCANA KINERJA TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel	Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3 dokumen
		Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	12 bulan layanan
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	1 dokumen
3	Meningkatnya efektivitas pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan	8 dokumen
4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Logistik Pemilu	Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu	5 paket
5	Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen usulan RENJA dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	2 laporan
7	Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	1 dokumen
		Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	1 dokumen
8	Terlindunginya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Tahun 2014	Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam Proses Penghitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 yang berbasis teknologi	Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	100%
10	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan
		Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang
		Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara	33 orang
11	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	2 jenis

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
11	pengelolaan arsip	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor	2 jenis
12	Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik	Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	100%
		Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu	1 laporan
		Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK	1 laporan
		Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor	100%
13	Tersusunnya dokumentasi arsip Tahapan Pemilu di KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	1 dokumen
14	Terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam	Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali
15	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bogor	Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%
		Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%
16	Terwujudnya KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	80%
		Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	7 kategori
		Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol
17	Terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pemilu	Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	90%
18	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	1 laporan
19	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu terkait teknis penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014	Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	80%
20	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	75%
		Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	75%
21	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	1 laporan
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
22	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	1 laporan
23	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan
		Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen

LAMPIRAN 2

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Nomor	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel	Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu	1 dokumen	1 dokumen	100%
3	Meningkatnya efektivitas pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014	8 dokumen	8 dokumen	100%
4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Logistik Pemilu	Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014	5 paket	5 paket	100%
5	Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen usulan RENJA dan RKA K/L TA 2015	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan (Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2015 dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen	1 dokumen	100%
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN KPU Tahun 2014)	2 laporan	2 laporan	100%
7	Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%
8	Terlindunginya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Tahun 2014	Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	100%	96,85%	96,85%
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam Proses Penghitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 yang berbasis teknologi	Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	100%	100%	100%
10	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	2 orang	2 orang	100%
		Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	33 orang	33 orang	100%
11	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	2 jenis	2 jenis	100%
		Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor		2 jenis	2 jenis	100%
12	Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik	Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	Dokumen Barang Milik Negara	100%	100%	100%
		Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu		1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK		1 laporan	1 laporan	100%
		Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor		100%	100%	100%
13	Tersusunnya dokumentasi arsip Tahapan Pemilu di KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	Undang-undang/ Peraturan/ Keputusan	1 dokumen	1 dokumen	100%
14	Terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam Rangka Pemilu Tahun 2014	Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali	39 kali	195%
15	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bogor	Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	Layanan Operasional Perkantoran Rutin	90%	90%	100%
		Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran		100%	100%	100%
16	Terwujudnya KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait Sengketa Pemilu	80%	100%	125%
		Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu			
		Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu	Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	12 parpol	12 parpol
17	Terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pemilu	Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	Publikasi Informasi Pemilu	90%	92%	102%

Nomor	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
18	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	Laporan Kampanye Pemilu Legislatif 2014	1 laporan	1 laporan	100%
19	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu terkait teknis penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014	Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	80%	80%	100%
20	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	75%	75,85	101%
		Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014		75%	79,12	105%
21	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%
22	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%
23	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	1 laporan	100%
		Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 dokumen	1 dokumen	100%

LAMPIRAN 3

**REALISASI ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, profesional dan akuntabel	Jumlah LPJ/LPAK yang disampaikan ke KPU tepat waktu dan valid	1 Laporan	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	46.975.000	44.465.705
		Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	3 dokumen	Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu 2014	106.044.000	77.269.950
		Rata-Rata lama hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masing-masing Sub-bagian di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN	12 bulan layanan	Layanan Perkantoran dalam Administrasi Keuangan	1.181.541.000	1.074.274.494
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan anggaran kebutuhan logistik Pemilu	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan logistik dengan harga satuan aset logistik secara wajar dan tepat waktu	1 dokumen	Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu	890.000	0
3	Meningkatnya efektivitas pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu Tahun 2014 yang dapat diimplementasikan	8 dokumen	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014	125.701.000	73.760.000
4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Logistik Pemilu	Jumlah Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu yang dapat menunjang kebutuhan Logistik Pemilu	5 paket	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014	5.160.142.000	2.854.943.298
5	Terwujudnya efektivitas perencanaan dan program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen usulan RENJA dan RKA K/L TA 2015	1 dokumen	Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan (Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RENJA) TA 2015 dan RKA K/L TA 2015	21.094.000	19.248.000
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah LAKIP dan TAPKIN yang valid dan tepat waktu	2 laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan TAPKIN KPU Tahun 2014)	3.650.000	3.163.000
7	Terwujudnya efektivitas Perencanaan dan Program KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	1 dokumen	Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014	138.815.000	67.550.000
		Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu yang informatif	1 dokumen	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	65.776.000	54.787.000
8	Terlindunginya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Tahun 2014	Persentase Data Pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014	348.254.000	225.470.420
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam Proses Penghitungan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 yang berbasis teknologi	Persentase Jumlah Formulir C1 yang diinput ke dalam Aplikasi Situng secara akurat dan valid	100%	Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	75.050.000	39.068.750
10	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 laporan	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1.765.000	1.590.000
		Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	2 orang	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	1.800.000	1.800.000
		Jumlah Penyelenggara Pemilu yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014	33 orang	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	111.011.000	66.426.500
11	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada yang dikelola dengan penataan yang tertib	2 jenis	Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	10.260.000	10.180.000
		Jumlah jenis arsip Pemilu dan pemilukada permanen yang diselamatkan kepada Lembaga Arsip Kota Bogor	2 jenis			
12	Terwujudnya pengelolaan BMN berdasarkan kaidah pengelolaan BMN yang baik	Persentase BMN yang diadministrasikan dalam Aplikasi SIMAK dengan baik dan akurat	100%	Dokumen Barang Milik Negara	27.431.000	18.450.000
		Jumlah laporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan hasil <i>stock opname</i> tepat waktu	1 laporan			
		Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang menyajikan data sesuai dengan data BMN berdasarkan SAK	1 laporan			
		Persentase TGR kepada KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor	100%			
13	Tersusunnya dokumentasi arsip Tahapan Pemilu di KPU Kota Bogor	Jumlah dokumen produk hukum arsip tahapan pemilu yang terhimpun dengan baik	1 dokumen	Undang-undang/ Peraturan/ Keputusan	54.150.000	39.859.750
14	Terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif dalam Rangka Pemilu Tahun 2014	Jumlah Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	20 kali	Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pemilu 2014	83.600.000	60.181.000

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
15	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Bogor	Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan	90%	Layanan Operasional Perkantoran Rutin	437.305.000	411.661.214
		Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%			
16	Terwujudnya KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu dan pemilukada yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu di lingkungan KPU Kota Bogor yang dapat dimenangkan oleh KPU	80%	Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait Sengketa Pemilu	3.493.000	3.400.000
		Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum	7 kategori	Penyusunan, Penyuluhan Materi serta Supervisi dan Bantuan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu	160.229.000	84.584.970
		Jumlah partai politik peserta pemilu yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye secara tepat waktu	12 parpol	Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum terkait Pemilu	2.000.000	915.000
				Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	44.568.000	36.506.750
17	Terwujudnya keterbukaan informasi publik terkait pemilu	Persentase permintaan data informasi yang dapat dipenuhi dan dilayani dengan baik	90%	Publikasi Informasi Pemilu	3.650.000	980.000
18	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Legislatif 2014	1 laporan	Laporan Kampanye Pemilu Legislatif 2014	41.260.000	38.959.300
19	Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu terkait teknis penyelenggaraan pemilu Legislatif Tahun 2014	Persentase peserta (penyelenggara pemilu) yang mengerti teknis penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor	80%	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota/PPLN	18.889.103.000	17.715.819.625
20	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014	75%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	955.752.000	690.525.590
		Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	75%			
21	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang akurat dan tepat waktu	1 laporan	Laporan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	3.960.000	3.960.000
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014	186.598.000	144.273.450
22	Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	1 laporan	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	43.550.000	2.556.640
23	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Jumlah laporan pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 laporan	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	30.384.000	12.933.450
		Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 yang valid dan akurat	1 dokumen	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	170.068.000	24.863.700
JUMLAH					28.535.869.000	23.904.427.556